



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 12 Tahun 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesejahteraan dalam bentuk tambahan penghasilan yang proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau Masa Jabatan 2014 - 2019.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1696);

Handwritten signature/initials

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja/Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau sebutan lainnya dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
10. Esselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
12. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS.
13. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
14. Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
15. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

19. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang tugas utamanya meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
20. Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih yang tugas utamanya meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Disiplin dan kinerja PNS dan CPNS;
- b. Memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan:
 - a. Kondisi Kerja atau Resiko Kerja;
 - b. Pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja atau Resiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja atau Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada SKPD yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Penghubung;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Rumah Sakit Jiwa Tampan;
 - h. Sekretariat Daerah (Bagian Keuangan).
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada SKPD yang tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi kerja atau Resiko Kerja.

Bagian Kedua

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dinamis;
- (2) Besaran alokasi dasar dan alokasi dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran I dan II, dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBERIAN

Pasal 6

- (1) Seluruh PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (3) PNS yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada suatu Jabatan tertentu dapat diberikan salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai jabatan yang diembannya.

Pasal 7

- (1) PNS Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja pada SKPD dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. berstatus dipekerjakan (titipan)/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. tidak menerima honorarium atau tunjangan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lain.
- (2) PNS Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Riau yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dan PNS yang berstatus dipekerjakan (titipan) / diperbantukan/ pada Pemerintah Provinsi Riau dapat menerima Tambahan Penghasilan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan dan anggarannya cukup tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) berkenaan;
- (3) PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah dilantik menduduki jabatan struktural;
- (4) Bagi PNS Daerah yang berstatus dipekerjakan/diperbantukan kepada Instansi vertikal, diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan tidak menerima Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja/Remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

- (1) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% dari total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.
- (2) PNS Daerah yang bertugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang menerima insentif pemungutan pajak daerah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:
 - a. Yang bertugas pada Kantor Pusat sebesar 50% dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan;
 - b. Yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan/atau Unit Pelayanan (UP) sebesar 75% dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.
- (3) PNS Daerah yang bertugas di SKPD PPK-BLUD yang menerima insentif dan/atau remunerasi diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.
- (4) Dalam hal insentif dan/atau remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diberikan karena sesuatu hal dan/atau tidak tercapainya target penerimaan sesuai Keputusan Gubernur, maka Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sebesar 100% dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.
- (5) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dengan memperoleh beasiswa dan/atau PNS dalam kondisi sakit tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) bulan, hanya diberikan tambahan penghasilan sebesar nilai alokasi dasar menurut golongan.

R. H. D. H. H. H.

- (6) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keahlian diatur sebagai berikut :
- Jenjang Utama (Gol IV/d s.d IV/e) disamakan dengan eselon IIIa Gol IV;
 - Jenjang Madya (Gol IV/a s.d IV/c) disamakan dengan eselon IIIa Gol III;
 - Jenjang Muda (Gol III/c s.d III/d) disamakan dengan eselon IVa Gol IV;
 - Jenjang Pertama (Gol III/a s.d III/b) disamakan dengan non eselon IV/a.
- (7) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keterampilan diatur sebagai berikut :
- Jenjang Penyelia (Gol III/c s.d III/d) disamakan dengan non eselon Gol IV/a;
 - Jenjang Pelaksana Lanjutan (Gol III/a s.d III/b) disamakan dengan non eselon Gol III/c;
 - Jenjang Pelaksana (Gol II/b s.d II/d) disamakan dengan non eselon Gol III/a;
 - Jenjang Pelaksana Pemula (Gol II/a) disamakan dengan non eselon Gol II/d.

Pasal 9

- (1) PNS yang tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu PNS yang:
- berstatus tersangka dan ditahan;
 - berstatus terdakwa atau terpidana;
 - cuti di luar tanggungan Negara;
 - cuti besar kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua serta cuti haji;
 - PNS yang diberhentikan sementara;
 - PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
 - tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50%;
 - tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti haji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai maksimal 2 (dua) bulan.

Pasal 10

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

BAB. V

KRITERIA DAN PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 11

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan kriteria yang terdiri dari:
 - a. Disiplin Kerja;
 - b. Sasaran Kerja Pegawai.
- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Mengikuti apel pagi;
 - b. Masuk kantor dan melaksanakan tugas setiap hari kerja;
 - c. Pulang kerja sesuai ketentuan.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (4) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pelaksanaan tugas rutin setiap hari sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian capaiannya untuk masa penilaian bulan berkenaan dan Hasil Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (6) Tata cara penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bobot penilaian disiplin dan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan pemberian Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi dinamis.

Handwritten signature/initials

- (2) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS dan CPNS bersifat statis/tetap.
- (3) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan :
 - a. Disiplin dengan bobot sebesar 40 % dari besaran nilai alokasi dinamis berdasarkan golongan yang meliputi :
 1. Apel pagi diberikan bobot sebesar 5 % dari besaran nilai dinamis berdasarkan golongan;
 2. Masuk kantor diberikan bobot sebesar 20 % dari besaran nilai dinamis berdasarkan golongan;
 3. Pulang kerja sesuai ketentuan diberikan bobot sebesar 15 % dari besaran nilai dinamis berdasarkan golongan.
 - b. Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot sebesar 60 % dari besaran nilai alokasi dinamis berdasarkan pelaksanaan tugas rutin setiap hari sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Perhitungan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan nilai capaian 51 – 75 dihitung berdasarkan persentase, sedangkan nilai capaian 76 keatas dihitung dengan bobot sebesar 60%.
- (5) Cara dan contoh hasil perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama

Alokasi Anggaran

Pasal 13


- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Bagian Kedua

Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Penilaian disiplin kerja;
 - b. Capaian sasaran kerja;
 - c. Hasil perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - d. Daftar permintaan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan hanya 1 (satu) jenis dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tempat PNS bertugas pada saat pembayaran.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD dan Pejabat Struktural secara berjenjang melakukan Pengawasan terhadap Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS Daerah/CPNS Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pemantau Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan rekomendasi penilaian disiplin PNS/CPNS berdasarkan hasil pengawasan terhadap PNS/CPNS yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Besaran tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Mekanisme pembayaran;
 - c. Pelaksanaan pembayaran;
 - d. Kebenaran usulan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - e. Indikator penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

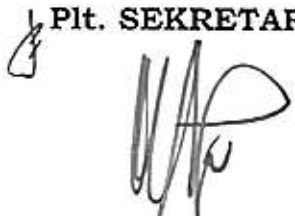
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Januari 2016

Pit. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Januari 2016

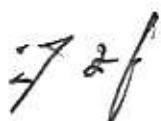
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 12

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIDANG HUKUM & HAM	R	KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG		KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG		KEPALA KANTOR	





Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal :

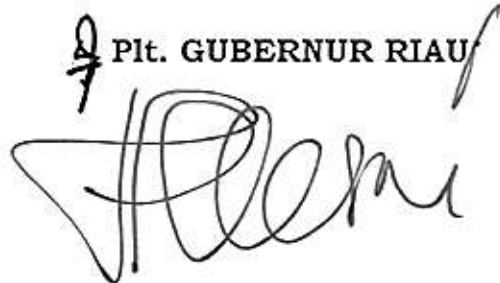
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KONDISI KERJA ATAU RESIKO KERJA**

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP Rp.	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1	Eselon II a	25,000,000.00	6,370,000.00	18,630,000.00
2	Eselon III a. Gol. IV	15,000,000.00	3,688,000.00	11,312,000.00
3	Eselon III a. Gol. III	13,400,000.00	3,276,000.00	10,124,000.00
4	Eselon IV a. Gol. IV	10,750,000.00	2,998,000.00	7,752,000.00
5	Eselon IV a. Gol. III	9,500,000.00	2,646,000.00	6,854,000.00
6	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	8,500,000.00	2,208,000.00	6,292,000.00
7	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	8,200,000.00	2,070,000.00	6,130,000.00
8	Golongan (III/c) s.d (III/d)	7,300,000.00	1,596,000.00	5,704,000.00
9	Golongan (III/a) s.d (III/b)	7,000,000.00	1,512,000.00	5,488,000.00
10	Golongan (II/a) s.d (II/d)	5,350,000.00	1,040,000.00	4,310,000.00
11	Golongan (I/a) s.d (I/d)	4,200,000.00	880,000.00	3,320,000.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Eselon II a	25,000,000.00	6,370,000.00	18,630,000.00
2	Eselon III a. Gol. IV	15,000,000.00	3,688,000.00	11,312,000.00
3	Eselon III a. Gol. III	13,400,000.00	3,276,000.00	10,124,000.00
4	Eselon IV a. Gol. IV	10,750,000.00	2,998,000.00	7,752,000.00
5	Eselon IV a. Gol. III	9,500,000.00	2,646,000.00	6,854,000.00
6	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	8,500,000.00	2,208,000.00	6,292,000.00
7	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	8,200,000.00	2,070,000.00	6,130,000.00
8	Golongan (III/c) s.d (III/d)	7,300,000.00	1,596,000.00	5,704,000.00
9	Golongan (III/a) s.d (III/b)	7,000,000.00	1,512,000.00	5,488,000.00
10	Golongan (II/a) s.d (II/d)	5,350,000.00	1,040,000.00	4,310,000.00
11	Golongan (I/a) s.d (I/d)	4,200,000.00	880,000.00	3,320,000.00
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU				
1	Eselon II a	20,500,000.00	6,370,000.00	14,130,000.00
2	Eselon III a. Gol. IV	13,250,000.00	3,688,000.00	9,562,000.00
3	Eselon III a. Gol. III	11,700,000.00	3,276,000.00	8,424,000.00
4	Eselon IV a. Gol. IV	10,050,000.00	2,998,000.00	7,052,000.00
5	Eselon IV a. Gol. III	9,000,000.00	2,646,000.00	6,354,000.00
6	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	8,900,000.00	2,208,000.00	6,692,000.00

27/7/2017

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP Rp.	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
7	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	8,300,000.00	2,070,000.00	6,230,000.00
8	Golongan (III/c) s.d (III/d)	6,900,000.00	1,596,000.00	5,304,000.00
9	Golongan (III/a) s.d (III/b)	6,300,000.00	1,512,000.00	4,788,000.00
10	Golongan (II/a) s.d (II/d)	4,600,000.00	1,040,000.00	3,560,000.00
11	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3,200,000.00	880,000.00	2,320,000.00
INSPEKTORAT				
1	Eselon II a	20,500,000.00	6,370,000.00	14,130,000.00
2	Eselon III a. Gol. IV	13,250,000.00	3,688,000.00	9,562,000.00
3	Eselon III a. Gol. III	11,700,000.00	3,276,000.00	8,424,000.00
4	Eselon IV a. Gol. IV	10,050,000.00	2,998,000.00	7,052,000.00
5	Eselon IV a. Gol. III	9,000,000.00	2,646,000.00	6,354,000.00
6	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	8,900,000.00	2,208,000.00	6,692,000.00
7	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	8,300,000.00	2,070,000.00	6,230,000.00
8	Golongan (III/c) s.d (III/d)	6,900,000.00	1,596,000.00	5,304,000.00
9	Golongan (III/a) s.d (III/b)	6,300,000.00	1,512,000.00	4,788,000.00
10	Golongan (II/a) s.d (II/d)	4,600,000.00	1,040,000.00	3,560,000.00
11	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3,200,000.00	880,000.00	2,320,000.00
BADAN PENGHUBUNG				
1	Eselon II a	16,000,000.00	6,370,000.00	9,630,000.00
2	Eselon III a. Gol. IV	11,000,000.00	3,688,000.00	7,312,000.00
3	Eselon III a. Gol. III	9,850,000.00	3,276,000.00	6,574,000.00
4	Eselon IV a. Gol. IV	9,500,000.00	2,998,000.00	6,502,000.00
5	Eselon IV a. Gol. III	8,500,000.00	2,646,000.00	5,854,000.00
6	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	8,250,000.00	2,208,000.00	6,042,000.00
7	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	8,000,000.00	2,070,000.00	5,930,000.00
8	Golongan (III/c) s.d (III/d)	7,000,000.00	1,596,000.00	5,404,000.00
9	Golongan (III/a) s.d (III/b)	6,500,000.00	1,512,000.00	4,988,000.00
10	Golongan (II/a) s.d (II/d)	5,000,000.00	1,040,000.00	3,960,000.00
11	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3,500,000.00	880,000.00	2,620,000.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	Eselon II a	16,500,000.00	6,370,000.00	10,130,000.00
2	Eselon III a. Gol. IV	9,750,000.00	3,688,000.00	6,062,000.00
3	Eselon III a. Gol. III	8,750,000.00	3,276,000.00	5,474,000.00
4	Eselon IV a. Gol. IV	8,600,000.00	2,998,000.00	5,602,000.00
5	Eselon IV a. Gol. III	7,700,000.00	2,646,000.00	5,054,000.00
6	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	7,500,000.00	2,208,000.00	5,292,000.00
7	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	6,500,000.00	2,070,000.00	4,430,000.00

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP Rp.	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
8	Golongan (III/c) s.d (III/d)	5,500,000.00	1,596,000.00	3,904,000.00
9	Golongan (III/a) s.d (III/b)	5,000,000.00	1,512,000.00	3,488,000.00
10	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3,500,000.00	1,040,000.00	2,460,000.00
11	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2,500,000.00	880,000.00	1,620,000.00
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN				
1	Eselon II a. Direktur	16,500,000.00	6,370,000.00	10,130,000.00
2	Eselon II b. Wakil Direktur	15,750,000.00	6,140,000.00	9,610,000.00
3	Eselon III a. Gol. IV	9,750,000.00	3,688,000.00	6,062,000.00
4	Eselon III a. Gol. III	8,750,000.00	3,276,000.00	5,474,000.00
5	Eselon IV a. Gol. IV	8,600,000.00	2,998,000.00	5,602,000.00
6	Eselon IV a. Gol. III	7,700,000.00	2,646,000.00	5,054,000.00
7	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	7,500,000.00	2,208,000.00	5,292,000.00
8	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	7,000,000.00	2,070,000.00	4,930,000.00
9	Golongan (III/c) s.d (III/d)	5,500,000.00	1,596,000.00	3,904,000.00
10	Golongan (III/a) s.d (III/b)	5,000,000.00	1,512,000.00	3,488,000.00
11	Golongan (II/a) s.d (II/d)	4,000,000.00	1,040,000.00	2,960,000.00
12	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3,000,000.00	880,000.00	2,120,000.00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KEUANGAN)				
1	Eselon III a. Gol. IV	10,330,000.00	3,688,000.00	6,198,000.00
2	Eselon III a. Gol. III	9,230,000.00	3,276,000.00	5,538,000.00
3	Eselon IV a. Gol. IV	8,800,000.00	2,998,000.00	5,280,000.00
4	Eselon IV a. Gol. III	7,860,000.00	2,646,000.00	4,716,000.00
5	Golongan (III/c) s.d (III/d)	6,450,000.00	1,596,000.00	3,870,000.00
6	Golongan (III/a) s.d (III/b)	6,120,000.00	1,512,000.00	3,672,000.00
7	Golongan (II/a) s.d (II/d)	4,950,000.00	1,040,000.00	2,970,000.00
8	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3,950,000.00	880,000.00	2,370,000.00


 Plt. GUBERNUR RIAU
 H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
1	Eselon I	44.000.000.00	17,600,000.00	26,400,000.00
2	Eselon II a (Asisten)	30.500.000.00	12,200,000.00	18,300,000.00
3	Eselon II a (Staf Ahli)	20.500.000.00	8,200,000.00	12,300,000.00
4	Eselon II a (Kepala SKPD)	15.925.000.00	6,370,000.00	9,555,000.00
5	Eselon II b	15.350.000.00	6,140,000.00	9,210,000.00
6	Eselon III a. Gol. IV	9.220.000.00	3,688,000.00	5,532,000.00
7	Eselon III a. Gol. III	8.190.000.00	3,276,000.00	4,914,000.00
8	Eselon III b	7.665.000.00	3,066,000.00	4,599,000.00
9	Eselon IV a. Gol. IV	7.495.000.00	2,998,000.00	4,497,000.00
10	Eselon IV a. Gol. III	6.615.000.00	2,646,000.00	3,969,000.00
11	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.520.000.00	2,208,000.00	3,312,000.00
12	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.175.000.00	2,070,000.00	3,105,000.00
13	Golongan (III/c) s.d (III/d)	3.990.000.00	1,596,000.00	2,394,000.00
14	Golongan (III/a) s.d (III/b)	3.780.000.00	1,512,000.00	2,268,000.00
15	Golongan (II/a) s.d (II/d)	2.600.000.00	1,040,000.00	1,560,000.00
16	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.200.000.00	880,000.00	1,320,000.00

✶ PIt. GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Handwritten signature/initials at the bottom left corner.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU

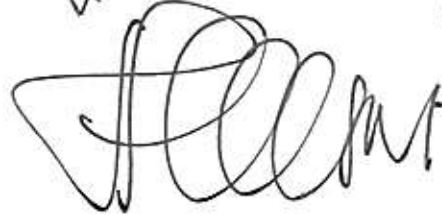
NOMOR :

TANGGAL : _____

BOBOT PENILAIAN TPP

KRITERIA dan INDIKATOR		BOBOT
I.	DISIPLIN	40%
	<u>Indikator Penilaian</u>	
	1. Mengikuti apel pagi	5%
	2. Masuk kantor dan melaksanakan tugas setiap hari kerja;	20%
	3. Pulang kerja sesuai ketentuan	15%
II.	SASARAN KERJA PEGAWAI	60%
	Melaksanakan tugas rutin setiap hari sesuai dengan tugas dan fungsi	60%

Plt. GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Handwritten signature/initials at the bottom left of the page.

CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

$$\text{Nilai Dinamis per Bobot} = \frac{\text{Besaran Nilai dinamis}}{100}$$

1. Cara Menghitung Bobot Apel Pagi:

$$\text{Bobot Apel Pagi} = \frac{\text{Jumlah Mengikuti Apel Pagi}}{\text{Jumlah hari kerja 1 Bulan}} \times \text{Bobot Maksimal}$$

Contoh:

Jumlah Hari Kerja 22 hari

Jumlah Hadir 22 Hari

Bobot Maksimal 5

Alokasi Dasar = Rp.1.512.000.-

$$\text{Nilai Dinamis per Bobot} = \frac{\text{Rp. 2.268.000.} -}{100} = \text{Rp. 22.680.} -$$

Perhitungan Bobot

$$\text{Bobot Apel Pagi} = \frac{22}{22} \times 5 = 5$$

Jadi nilai TPP = 5 x Rp.22.680.-=**Rp.113.400.-**

2. Cara Menghitung Bobot Masuk Kantor dan Melaksanakan Tugas:

Bobot Masuk Kantor dan Melaksanakan Tugas=

$$\frac{(\text{Jmlh Absensi Masuk Pagi} + \text{Jmlh Absensi Istirahat Siang} + \text{Jmlh Absensi Masuk setelah Istirahat})}{(\text{Jumlah hari kerja 1 Bulan} \times 3)} \times \text{Bobot Maksimal}$$

Contoh:

Jumlah Hari Kerja 22 hari

Jumlah Absensi Masuk Pagi 22 Hari

Jumlah Absensi Istirahat Siang 22 Hari

Jumlah Absensi Masuk Setelah Istirahat 22 Hari

Bobot Maksimal 25

Perhitungan Bobot

$$\text{Bobot Masuk Kantor dan Melaksanakan Tugas} = \frac{(22 + 22 + 22)}{(22 \times 3)} \times 25 = 25$$

Jadi nilai TPP = 25 x Rp.22.680.-=**Rp.567.000.-**

24 2017/2

3. Cara menghitung Bobot Pulang Kerja sesuai Ketentuan:

$$\text{Bobot Pulang Kerja sesuai Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Absensi Pulang Kerja}}{\text{Jumlah hari kerja 1 Bulan}} \times \text{Bobot Maksimal}$$

Contoh:

Jumlah Hari Kerja 22 hari

Jumlah Hadir 22 Hari

Bobot Maksimal 10

Perhitungan Bobot

$$\text{Pulang Kerja sesuai Ketentuan} = \frac{22}{22} \times 10 = 10$$

Jadi nilai TPP = 10 x Rp.22.680.- = **Rp.226.800.-**

Jumlah Nilai TPP Disiplin Kerja = 113.400 + 567.000 + 226.800 = Rp.907.200.-

4. Cara menghitung Bobot Melaksanakan Tugas Rutin setiap hari sesuai Tupoksi:

Bobot Melaksanakan Tugas Rutin setiap hari sesuai Tupoksi

$$= \frac{\text{Nilai Sasaran Kerja}}{\text{Nilai Maksimal Sasaran Kerja}} \times \text{Bobot Maksimal}$$

Contoh:

Nilai Sasaran Kerja 51

Bobot Maksimal 60


Perhitungan Bobot

Bobot Melaksanakan Tugas Rutin setiap hari sesuai dengan Tupoksi

$$= \frac{(51)}{92} \times 60 = 33.26$$

Jadi nilai TPP = 33.26 x Rp.22.680.- = **Rp.754.356.-**

Plt. GUBERNUR RIAU



H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN

re 4 8 4 3 2 f

Lampiran V : Peraturan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal :

CONTOH :

SASARAN KERJA PEGAWAI

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEJABAT PENILAI		PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
Nama : SYARIFAH PERITA MUSFITA, SE		Nama : RADJA RIANA AGISTA, S.Sos					
NIP : 19860110 200902 2 008		NIP : 19880825 201102 2 001					
Pangkat/Gol Ruang : Penata / III.c		Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I / III.b					
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian Setda		Jabatan : Staf Sub Bagian Kepegawaian					
Unit Kerja : Biro Organisasi SETDA Provinsi Riau		Unit Kerja : Biro Organisasi SETDA Provinsi Riau					
NO	ISI KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET					
		KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		
1	Memproses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Setda Provinsi Riau	20	dokumen	100	1	bulan	
2	Membuat daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Setda Provinsi Riau	1	dokumen	100	1	bulan	
3	Memproses Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Setda Provinsi Riau	10	dokumen	100	1	bulan	
4	Memproses Berkas Pensiun Pegawai Setda Provinsi Riau	2	dokumen	100	1	bulan	
5	Membantu Mengelola Arsip Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau	30	dokumen	100	1	bulan	
6	Memproses Pembuatan KARIS dan KARSU Pegawai Di Lingkungan Setda Provinsi Riau	4	dokumen	100	1	bulan	

Pejabat Penilai,

Pekanbaru, 02 Januari 2015
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

SYARIFAH PERITA MUSFITA, SE
NIP. 19860110 200902 2 008

RADJA RIANA AGISTA, S.Sos
NIP. 19880825 201102 2 001

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 29 Januari 2015

NO	I. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN	TARGET			REALISASI			PENGGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA
		Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memproses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Setda Provinsi Riau	20 dokumen	100	1 bulan	15 dokumen	85	1 bulan	236	78.67
2	Membuat daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Setda Provinsi Riau	1 dokumen	100	1 bulan	1 dokumen	85	1 bulan	261	87.00
3	Memproses Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Setda Provinsi Riau	10 dokumen	100	1 bulan	7 dokumen	85	1 bulan	231	77.00
4	Memproses Berkas Pensiun Pegawai Setda Provinsi Riau	2 dokumen	100	1 bulan	2 dokumen	85	1 bulan	261	87.00
5	Membantu Mengelola Arsip Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau	30 dokumen	100	1 bulan	17 dokumen	85	1 bulan	218	72.56
6	Memproses Pembuatan KARIS dan KARSU Pegawai Di Lingkungan Setda Provinsi Riau	4 dokumen	100	1 bulan	4 dokumen	85	1 bulan	261	87.00
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :									
1									
2									
3									
4									
Nilai Capaian SKP									81.54
									(Baik)

Pekanbaru, 29 Januari 2015
Pejabat Penilai,

SYARIFAH PERITA MUSFITA, SE
NIP. 19860110 200902 2 008

revisi 20/1/2015

CONTOH :
HASIL PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

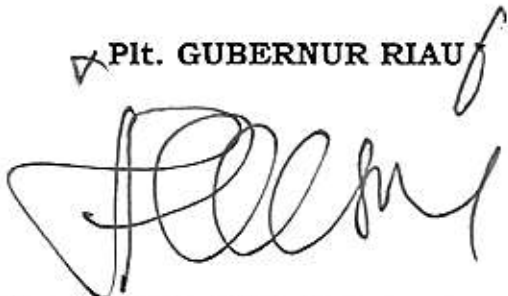
**HASIL PERHITUNGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Klasifikasi : Golongan IIIa s.d IIIb
Jangka Waktu : 02 Januari s/d 29 Januari 2016
Total Hari Kerja : 22
Status Pegawai : PNS

PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI			
Nama	: SYARIFAH PERITA MUSFITA, SE	Nama	: RADJA RIANA AGISTA, S.Sos		
NIP	: 19860110 200902 2 008	NIP	: 19860825 201102 2 001		
Pangkat/Golongan	: Penata / III.c	Pangkat/Golongan	: Penata Tk.I / III.b		
Jabatan	: Kasubbag Kepegawain Setda	Jabatan	: Staf Sub Bagian Kepegawain		
Unit Kerja	: Biro Organisasi SETDA Provinsi Riau	Unit Kerja	: Biro Organisasi SETDA Provinsi Riau		
NO	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT	CAPAIAN	% CAPAIAN	BOBOT HASIL
I. DISIPLIN KERJA					
1	Apel Pagi	5	22	100	5
2	Masuk kantor dan melaksanakan tugas	25	88	100	25
3	Pulang Kerja Sesuai ketentuan	10	22	100	10
TOTAL PENILAIAN DISIPLIN KERJA		-	-	-	40
II. SASARAN KERJA					
1	Melaksanakan Tugas Rutin setiap Hari sesuai dengan Tupoksi	60	81.54	83.63	60
TOTAL PENILAIAN SASARAN KERJA		-	-	-	60
PERHITUNGAN TUNJANGAN					
Alokasi Dasar	Rp	1,512,000.00			
Disiplin Kerja	Rp	907,200.00			
Sasaran Kerja	Rp	1,360,800.00			
Total TPP	Rp	3,780,000.00			
Potongan Pajak	Rp	189,000.00			
Penerimaan Bersih	Rp	3,591,000.00			

Pekanbaru,
Pejabat Penilai/ Atasan Langsung

SYARIFAH PERITA MUSFITA, SE
Penata / III.c
NIP. 19860110 200902 2 008

Pt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

re 24 08/12/21